

Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Camat Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Artikel Penelitian

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan di sebuah kantor dinas Kecamatan Sukamulia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian digunakan adalah diskriptif kualitatif, penelitian diskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan peristiwa maupun phenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa epektivitas pelayanan umum dari aparat pemerintah terhadap orga masyarakat pengguna jasa pelayanan terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja aparat pemerintah setempat. Dengan kualitas disiplin kerja aparat pemerintah yang memadai, maka birokrat ditingkat dinas mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara epektif. Proses pelayanan umum cenderung ditentukan oleh tingkat disiplin aparat dalam melayani kepengtingan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan intraksi yang harmonis, baik antara aparat dengan sesama aparat birokrasi maupun antara aparat dengan masyarakat. Sesuai dengan prosedur diatas yang telah ditetapkan masyarakat menginginkan agar adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari hasil wawancara yang rata-rata memberikan masukan agar proses pelayanan lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas bagi kepuasan masyarakat.

¹Universitas Nahdlatul Wathan
Mataram
toharah@gmail.com

Kata Kunci: *Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik*

PENDAHULUAN

Pelayanan birokrasi merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana sebenarnya aparat pemerintah yang memiliki sebutan abdi masyarakat dan abdi Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Pada kenyataannya justru terbalik, masyarakat yang ingin menerima pelayanan masalah menjadi pelayanan terhadap keinginan dari aparat pemerintah di kecamatan sukamulia.

Secara umum, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga khususnya di kecamatan sukamulia Lombok timur yang memerlukan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan social dan politik, merupakan pembuatan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Common Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2021 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Sering sekali muncul berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suku menurut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan. Sikap warga di khususnya kecamatan sukamulia tidak pernah bisa menghindar dari berhubungan dengan birokrasi pemerintah, pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat dan setiap warga Negara. Itulah sebabnya pemerintah kecamatan sukamulia dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menurut tanggungjawab yang tinggi terhadap masyarakat.

Hal ini sesuai dengan paradigma kebijakan otonomi daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang mengubah tugas utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat, sehingga unit-unit pemerintah yang berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu diperkuat, termasuk kecamatan. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Bila fungsi ini dapat dijalankan secara konsisten, maka secara bertahap akan berdampak strategis dalam menekan inisiatif pemekaran daerah.

Sejalan dengan itu, sebagai penegasan atas ketidakjelasan peran fungsi kecamatan serta jabatan terhadap tuntutan masyarakat, maka pada tanggal 15 Januari 2010 Kementerian Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pemerintah No 4 Tahun 2010 ini merupakan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen yang mencakup pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan. Munculnya kebutuhan akan pelayanan public yang bersih membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dibawahnya dengan harapan pelayanan public yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Kebijakan yang dimaksud adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan.

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, tidak diskriminatif, dan transparan selain itu pemerintah juga menyusun rancangan undang-undang tentang pelayanan minimum. Namun upaya-upaya yang telah ditempuh nampak kurang optimal, salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan public yang banyak dikenal dengan sifat birokrasi dan banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan masyarakat penggunaanya, kemudian pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan/ mengutamakan kepentingan kepemimpinan / organisasi saja.

Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan harus dilakukan, terutama bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kinerja aparat kantor kecamatan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus berupaya meningkatkan kemampuan kerjanya semaksimal mungkin, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sukamulia sangat tergantung pada kinerja aparatnya. Sedangkan masyarakat hanya dapat menilai kinerja kantor kecamatan dari kualitas pelayanan yang diterima.

Peningkatan kinerja aparatur menjadi penting mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak dan peran serta yang lebih besar bagi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dimana pemerintah beserta aparturnya lebih berperan sebagai fasilitator, perubahan arah kebijakan ini membawa implikasi terhadap kemampuan profesionalisme pegawai dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam menghadapi persaingan ketat dengan Negara-negara lain didunia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam hal ini yaitu :

1. Apa saja kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan di kantor camat Sukamulia kabupaten Lombok Timur ?
2. Bagaimana kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan Sukamulia kabupaten Lombok Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu tersebut mempunyai kinerja keberhasilan yang telah ditetapkan. Kinerja keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam menncapai tujuan (Robertson, 2002).

Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian mencapai target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker (dalam BPKP, 2002) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons (dalam BPKP, 2002) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil actual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga saat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap petangungjawaban yang diberikan oleh

penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong meningkatkan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat beberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kelompok masukan (*input*); (2) kelompok proses (*process*); (3) kelompok keluaran (*output*); (4) kelompok hasil (*outcome*); (5) kelompok manfaat (*benefit*); (6) kelompok dampak (*impact*).

Aparatur

Aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan kepegawaian. (Soerwono Hadayaningrat : 1982).

Aparatur adalah keseluruhan pejabat Negara yang atau organ pemerintah yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh Negara kepadanya. (Wijaya : 1995).

Ada dua istilah yang memiliki makna yang hampir sama akan tetapi penggunaannya sering dipertukarkan dan dinggap sama dalam pembicaraan sehari-hari yaitu istilah aparat dan aparatur. Istilah

aparatur memiliki pengertian yang lebih umum yang meliputi alat atau perlengkapan untuk mencapai tujuan tertentu, sementara itu istilah aparatur lebih khusus ditujukan untuk menyebut perangkat atau alat Negara dan pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Negara dan pemerintahan, contohnya pegawai Negara sipil yang bertugas untuk kepentingan Negara dan pelayanan pada masyarakat.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintahan yang paling kesat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintahan berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya.

Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Adapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Akan tetapi, pelayanan publik menjadi sorotan kinerja pemerintah sejak lama. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk itu, diperlukan perhatian semua pihak, melalui dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, aparatur Negara sebagai pelayanan, dan masyarakat sebagai pengawas jalannya pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Ada beberapa konsep manajemen pelayanan antaranya adalah pelayanan umum, pelayanan publik, pelayanan pemerintah dan pelayanan perizinan. Keempat istilah tersebut di Indonesia digunakan sebagai terjemahan dari public service, seperti yang dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Administrasi pemerintahan disejajarkan / dipakai secara silih berganti dan dipergunakan sebagai

sinonim dari pelayanan perizinan, terjemahan dari administrative service. Adapun pelayanan umum lebih sesuai jika digunakan untuk menerjemahkan konsep public service, yang dapat dipadankan dengan istilah pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian kualitatif di namakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama dinamakan metode posetpositivistik karena berlandaskan pada filsafat posetpositivisme. Metode ini disebut juga metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi onyok yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Subyek penelitian ini adalah sebuah instansi kedinasan yang berada di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Sumber data diperoleh dari aparatur dalam instansi tersebut yang dipandang memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap kondisi kinerja aparatur.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dan pengamatan langsung di lapangan dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan sudah cukup baik. Hal ini disimpulkan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur di kantor camat sukamulia.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Camat Sukamulia, H. SUWARDI, Sos hari senin 20 september 2021 jam 10:17 wita mengatakan :

"Sebagai seorang kepala kecamatan adalah merupakan seorang pemimpin bagi apartur di sebuah intasi tersebut, kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses berkerjanya suatu system dari komponen-komponen dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembagian

sehingga akan terwujud suatu kualitas yang akan dicapai. Sesuai di katakana oleh bapak camat sukamulia bahwa sebuah system penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan tersebut berasal dari prosedur-prosedur pemerintahan daerah. Khususnya dalam system pelayanan ini bapak camat mengatakan bahwa semua pelayanan berdasarkan setandar operasional pemerintahan kabupaten Lombok timur. Sedangkan dalam kinerja aparatur di kecamatan sukamulia bapak camat mengatakan bahwa mutu suatu kinerja aparatur tersebut itu dari diklat pemerintah daerah.”

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan di kantor camat sukamulia yaitu berkordinasi secara langsung dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Kasubbag UM & Kepeg, LALU SATIRMAN, S.AP. hari senin 20 september 2021 jam 09: 20 wita Mengatakan:

“Sarana dan prasarana yang berdampak terhadap kinerja PNS yang ada di kantor camat sukamulia adalah sarana penunjang seperti peralatan computer atau laptop masih belum memadai dari jumlah pekerjaan atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu peralatan seperti yang dimaksud merupakan hal yang terpenting untuk sebuah pelayanan terutama hal-hal yang sifatnya administrasi. Sarana pendukung yang lain seperti kendaraan roda dua masih kurang dari jumlah pejabat yang ada di kantor camat sukamulia. Sarana ini cukup memegang peranan penting sebagai sarana transportasi terutama dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat di lapangan, sementara untuk wilayah kecamatan sukamulia secara umum. Masyarakat yang terlayani berada di 9 desa sebagai wilayah yang ada di kecamatan sukamulia.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan perasarana belum memadai dari jumlah pekerjaan dan peralatan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kasi Pelayanan Umum LALU SAHRUL,A.Md hari senin 20 september 2021 jam 09:10 wita mengatakan:

“Kendala pelayanan di kantor camat sukamulia dari seksi pelayanan umum terkendala oleh

kesadaran masyarakat terhadap semua persyaratan yang telah kita isyaratkan untuk sebuah pelayanan, kurangnya informasi atau sosialisasi di tatanan birokrasi terbawah yang ada di pemerintahan desa.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dengan pemerintah kurangnya sosialisasi di setiap-tiap desa khususnya kecamatan sukamulia.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kasi Pemerintahan MAWARDI,SH hari senin 20 september 2021 jam 09:01 wita mengatakan:

“Program-program yang dilakukan oleh pemerintah camat sukamulia yang sudah berjalan di antaranya NTQ, BASNAS, Tanah Pejantu di setiap- tiap desa dari desa induk sampai dengan desa pemekaran, dan tak lupa juga program yang sekarang-karang ini berjalan yaitu vaksinisasi, ini yang sering kita jalankan dikarenakan banyaknya penyebaran virus covid 19. Dan program-program yang lain tidak bisa di jalankan karna terhambatnya oleh virus corona ini.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa program-program yang lain tidak bisa di jalankan karena terhambatnya oleh virus Covid 19 ini.

Berdasarkan wawancara saya dengan masyarakat kecamatan Sukamulia

Ibu Paoziah mengatakan :

“ menurut saya kinerja pemerintah dalam melayani saya saat membuat surat keterangan untuk merubah data kartu keluarga yang baru sangat mudah dan evesien, di bandingkan pembuatan surat kartu keluarga pada tahun sebelumnya sangatlah sulit di bandingkan dengan tahun yang ini. Untuk itu saya sebagai masyarakat merasakan bahwa pelayanan di kantor camat sukamulia yang saat ini sangatlah bagus. “ (25 Oktober 2021).

Ibu Muliyani mengatakan :

“menurut saya dengan pelayanan pemerintah say ini sangat memudahkan saya sendiri khususnya usia saya saat ini sangat tua, untuk membuat surat keterangan usaha saya tidak perlu langsung ke kantor camat, saya cukup memberi tahu kepala wilayah di dekat rumah saya sendiri.” (26 Oktober 2021)

Ibu Mazroah mengatakan :

“menurut saya pelayanan pemerintah saat ini sangat bagus dan mudah bagi saya pribadi, seperti saya untuk mengajukan pembuatan surat akta kelahiran anak saya dan tidak perlu menunggu lama untuk hasil surat akta kelahiran anak saya dan tidak memungut biaya sepeserpun. (26 Oktober 2021) “

Ibu Zohri mengatakan :

“menurut saya pribadi sebagai pedagang kecil pemerintah desa dan kecamatan menyarankan surat UMKM sangatlah mudah dan efisien untuk masyarakat seperti saya ini untuk membantu usaha sendiri, saya berterimakasih kepada pemerintah dalam pelayanan tersebut.” (26 Oktober 2021)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan kesimpulan strategi meningkatkan kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan di kantor camat sukamulia sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sukamulia dalam meningkatkan kinerja sudah berjalan namun dalam pelaksanaan strategi meningkatkan kinerja tersebut masih belum tepat. Dilihat melalui beberapa indikator salah satunya pendidikan dan pelatihan yang dibatasi, membuat tidak semua pegawai bisa mengikuti diklat tersebut. Dalam pelaksanaan strategi peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukamulia dikatakan belum tepat, karena tidak sesuai dengan teori yang telah di kemukakan tentang strategi peningkatan kinerja pegawai.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukamulia yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi hambatan dalam strategi peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukamulia. Berdasarkan sumber daya manusia dalam strategi peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukamulia dengan jumlah pegawai yang masih sedikit, sehingga menghasilkan kinerja yang tidak optimal, keterbatasan kemampuan.
3. Pegawai menjadi hambatan dalam strategi peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukamulia.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan mengenai strategi peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukamulia, berikut penulis dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk pemerintah, intansi terkait yaitu:

1. Pemerintah Kecamatan Sukamulia harus memperbaiki strategi yang ada di Kecamatan Sukamulia guna untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Pemerintah kabupaten seharusnya mengadakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tidak dibatasi jumlah pegawai yang mengikuti diklat.
2. Pemerintah kecamatan harus membuat anggaran kecamatan untuk melengkapi sarana dan prasarana agar lebih memudahkan pegawai untuk memudahkan pekerjaannya.

REFERENSI

- Ade Aristia Ningsih, Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, Kota Nunukan, tahun 2015
- Ahmad Syam, Kinerja Ap aratur Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kabupaten Jenepono , Tahun 2018
- Ali Faried, 2011, Teori dan Konsep Administrasi dan Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi, Kelapa Gading Permai, Jakarta
- Elya Yuniarti, Pelayanan Di Kampung KB, Lombok Timur, Tahun 2020
- <https://www.pengertianmenurutparaahli.net>
- Maksun Mohamad, Mardiasmo, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta, 2006)
- Michellia Agustin, Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Mandau Kabupaten Bengkalis
- Mukarom Zaenal, Laksana Wijaya Muhibudin, Nasrudin Endin, 2015, Manajemen Pelayanan Publik, Bandung 42053
- Rendra Risto Uri, Peran Pemerintah Sebagai Pelayan Publik, Kabupaten Bolang
- Mugondo

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D, Bandun

Laporan Penduduk Kecamatan Sukamulia 2021

Profil Kantor Camat Sukamulia Kabupaten Lombok
Timur